

PRAKTIK KOMUNIKASI DIPLOMATIK ASEAN DALAM PERTEMUAN MULTILATERAL: ANALISIS TEORI DIPLOMASI DAN BAHASA DIPLOMASI

**Muhamad Karang Seto, Zelda Nurarin Trianditi Wicaksono, Moh.Naufal
Effendy, Nathaniel Gabe Sahala Panjaitan
Universitas Negeri Surabaya^{1,2,3,4}**

25041184094@mhs.unesa.ac.id¹, 25041184008@mhs.unesa.ac.id²,
25041184195@mhs.unesa.ac.id³, 25041184151@mhs.unesa.ac.id⁴

Artikel diserahkan pada: 10-11-2025; direvisi pada: 20-11-2025; diterima pada: 5-12-2025

ABSTRAK:

Penelitian ini memperlihatkan bahwa ASEAN berperan sebagai wadah kerja sama politik, ekonomi, dan keamanan antarnegara anggota yang mengandalkan komunikasi diplomatik sebagai mekanisme utama dalam menjaga stabilitas kawasan. Dalam setiap pertemuan multilateral, ASEAN menerapkan gaya komunikasi khas yang dikenal sebagai *ASEAN Way*, yaitu pola interaksi yang menekankan prinsip konsensus, non-intervensi, musyawarah, serta penggunaan bahasa diplomasi yang halus, eufemistik, dan tidak konfrontatif. Penelitian ini bertujuan mempelajari penggunaan bahasa diplomasi tersebut sekaligus menjelaskan bagaimana nilai-nilai *ASEAN Way* membentuk pola komunikasi regional. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dukungan analisis wacana kritis Fairclough dan kajian literatur diplomasi untuk menelaah konstruksi bahasa diplomasi dalam dokumen resmi ASEAN, pernyataan bersama, serta praktik komunikasi dalam forum multilateral. Transformasi digital juga dianalisis sebagai faktor baru yang memperluas ruang diplomasi publik ASEAN melalui penggunaan platform digital untuk membangun citra kolektif dan memperkuat soft power kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa diplomasi ASEAN digunakan secara strategis untuk mempertahankan keharmonisan dan meredam potensi konflik antarpemerintah. Nilai-nilai *ASEAN Way* terbukti membentuk pola komunikasi yang stabil, kooperatif, dan berorientasi pada pengelolaan konflik secara damai. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi diplomatik bukan sekadar alat teknis, tetapi merupakan identitas normatif ASEAN yang memadukan nilai kebersamaan, strategi politik, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika global, termasuk perkembangan diplomasi digital.

Kata kunci: Komunikasi diplomatik, ASEAN, diplomasi digital, bahasa diplomasi, *ASEAN Way*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Diplomasi modern tidak dipahami lagi hanya sebagai instrumen politik luar

negeri, tetapi juga sebagai proses dari komunikasi yang kompleks, terstruktur serta dinamis antaraktor internasional. Dalam praktiknya, diplomasi bergerak

melalui jalur resmi yang melibatkan kementerian luar negeri dan juga perwakilan-perwakilan asing setempat. Ini merupakan jalur yang bersifat mengikat, karena menurut hukum internasional, setiap pernyataan, baik lisan maupun tertulis, yang disampaikan oleh menteri luar negeri maupun perwakilan resmi dianggap mewakili negara dan mempunyai implikasi hukum. Maka itulah, seluruh urusan resmi antarnegara harus disampaikan melalui saluran diplomatik yang sah dan tidak boleh dilakukan secara langsung kepada instansi lain di negara penerima. Ini merupakan mekanisme yang memuat kepastian, legitimasi, serta keamanan hubungan antarnegara.

Di dalam konteks Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), diplomasi menjadi sebuah fondasi utama untuk keberlangsungan organisasi. "Cara ASEAN" (The ASEAN Way) yang juga berlandaskan musyawarah, konsensus, non-intervensi, dan dialog konstruktif menjadi pedoman dalam membangun sebuah komunikasi diplomatik antarnegara anggota maupun dengan mitra eksternal. Sepanjang tahun 2025, efektivitas diplomasi ASEAN tercermin dan berjalan dalam berbagai macam forum strategis seperti 6th Interface Meeting between AICHR and CSOs, 32nd ASEAN-EU Joint Cooperation Committee (JCC), dan 1st Interface

Meeting AICHR-ROK. Forum-forum ini tidak hanya sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi arena penting bagi ASEAN untuk mengartikulasikan kepentingan nasional dan regional, memperkuat kerja sama, sekaligus menjaga stabilitas kawasan.

Di tengah-tengah arus dinamika geopolitik global yang dipengaruhi oleh rivalitas kekuatan besar, kemampuan komunikasi diplomatik ASEAN menjadi semakin krusial. Artikel ini bertujuan untuk mengenali pola-pola komunikasi diplomatik yang dipakai ASEAN dalam berbagai macam pertemuan strategis tersebut. Diluar itu, artikel ini menelaah serta memahami bagaimana bahasa diplomasi yang khas juga praktik diplomasi publik digital digunakan secara sinergis untuk memperkuat soft power ASEAN di tingkat internasional.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik komunikasi diplomatik ASEAN dalam pertemuan multilateral?
2. Bagaimana bahasa diplomasi digunakan oleh ASEAN, termasuk strategi eufemisme dan *constructive ambiguity*, dalam menjaga stabilitas hubungan antarnegara anggota?

3. Bagaimana nilai-nilai ASEAN *Way* membentuk pola komunikasi diplomatik dalam forum regional?
4. Bagaimana peran diplomasi publik dan diplomasi digital mendukung penyebaran nilai dan citra ASEAN sebagai aktor normatif di kawasan?

3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pola komunikasi diplomatik ASEAN dalam konteks pertemuan multilateral.
2. Menganalisis penggunaan bahasa diplomasi, termasuk strategi linguistik yang digunakan untuk meredam konflik dan menjaga keharmonisan politik.
3. Menjelaskan bagaimana prinsip ASEAN *Way* memengaruhi praktik diplomasi dan pengambilan keputusan antarpemerintah ASEAN.
4. Mengidentifikasi peran diplomasi publik dan diplomasi digital dalam memperluas soft power dan legitimasi ASEAN di tingkat regional maupun global.

4. Manfaat Penelitian

4.1. Manfaat Teoretis

4.1.1 Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian diplomasi, komunikasi internasional, dan analisis wacana kritis dalam konteks organisasi regional Asia Tenggara.

4.1.2 Memperkaya literatur mengenai bahasa diplomasi dan praktik ASEAN *Way* sebagai model komunikasi multilateral.

4.2. Manfaat Praktis

4.2.1 Menjadi referensi bagi akademisi, praktisi diplomasi, serta pembuat kebijakan dalam memahami dinamika komunikasi diplomatik ASEAN.

4.2.2 Memberikan gambaran strategis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi diplomatik, termasuk dalam pemanfaatan diplomasi publik dan diplomasi digital.

3. Manfaat Sosial dan Regional

1. Menguatkan pemahaman publik mengenai pentingnya prinsip dialog, konsensus, dan diplomasi damai dalam

menjaga stabilitas kawasan.

2. Mendukung penguatan soft power ASEAN sebagai aktor yang mempromosikan kerja sama, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan.

Kajian Teori

Untuk menganalisis fenomena ini, empat kerangka teoretis digunakan sebagai landasan.

1. **Diplomasi sebagai Proses Komunikasi Antarnegara (Berridge, 2015)**

“Diplomasi sebagai Proses Komunikasi Antarnegara”. Bisa dijadikan landasan bahwa diplomasi itu proses komunikasi kolaboratif.

Berridge (2015) “Pencapaian ASEAN dalam membangun institusi multilateral dan mempromosikan regionalisme inklusif (‘open regionalism’) menunjukkan bahwa ‘ASEAN Way’ berperan dalam komunikasi diplomatik kawasan.” (Caballero Anthony, 2022) mendefinisikan diplomasi bukan sebagai kebijakan, melainkan sebagai proses komunikasi terorganisasi yang esensial antara aktor negara dan non-negara. Tujuan utama diplomasi adalah mencapai kesepakatan dan koordinasi kebijakan tanpa

konfrontasi langsung. Dalam konteks ASEAN yang beroperasi berdasarkan konsensus, proses komunikasi ini menjadi elemen penting dalam menjaga koordinasi antarnegara anggota yang beragam.

2. **Diplomasi Publik dan Soft Power (Melissen, 2005; Hall & Smith, 2013)**

“Diplomasi Publik dan Soft Power” untuk mendukung argumen tentang pergeseran dari komunikasi antarnegara ke komunikasi publik. Melissen (2005) menekankan pergeseran dari komunikasi antar-pemerintah (State-to-State) ke komunikasi dengan publik asing (State-to-People) guna membangun citra positif dan dukungan kebijakan luar negeri. Sementara itu, Hall & Smith (2013) memperluas konsep ini dengan menunjukkan bahwa diplomasi publik di Asia juga menjadi arena *kompetisi soft power* antarnegara. Dalam konteks ASEAN, hal ini berarti bahwa komunikasi publik bukan hanya sarana penyebaran nilai, tetapi juga instrumen strategis untuk mempertahankan pengaruh di tengah rivalitas kekuatan regional.

3. Bahasa Diplomasi (Hare & Harland, 2019)

“Bahasa Diplomasi”. Bisa dijadikan kerangka untuk menjelaskan penggunaan eufemisme dan constructive ambiguity di ASEAN. Hare & Harland (2019) menyoroti pentingnya linguistik dalam praktik diplomasi. Bahasa diplomasi memiliki ciri khas seperti netralitas, kesopanan, penggunaan eufemisme, dan ambiguitas terukur (*constructive ambiguity*). Strategi ini memungkinkan penyampaian isu sensitif tanpa menimbulkan eskalasi konflik dan menjaga keharmonisan antarnegara.

Karakteristik bahasa diplomatik yang diidentifikasi oleh Hare & Harland (2019) juga sejalan dengan nilai komunikasi ASEAN sebagaimana dijelaskan oleh Tekunan (2014). Dalam setiap siaran pers resmi, bahasa yang digunakan menampilkan **constructive ambiguity**—ketidakjelasan dalam yang disengaja untuk menjaga keseimbangan kepentingan. Frasa seperti “shared commitment,” “constructive engagement,” dan “explored potential collaborations” berfungsi sebagai instrumen

linguistik untuk menegaskan keterbukaan tanpa komitmen keras. Dalam konteks budaya diplomatik ASEAN, hal ini membantu mencegah “kehilangan muka” (loss of face) dan menjaga keharmonisan.

Perkuatan dengan Teori Linguistik Politik: Menurut Fairclough (2010), bahasa adalah alat kekuasaan; cara pesan dibingkai dapat memajukan tujuan strategis sekaligus menghindari konfrontasi. Dalam konteks ASEAN:

“Language is a tool of power; the way messages are framed can advance strategic goals while avoiding confrontation.”

(Fairclough, 2010)

Ini menunjukkan bahwa pilihan kata dan struktur kalimat dalam diplomasi ASEAN bukan kebetulan, tetapi strategi komunikasi yang sadar konteks, bertujuan menjaga stabilitas hubungan antarnegara anggota, dan mengharmoniskan interaksi dengan aktor eksternal. Dengan demikian, bahasa diplomasi ASEAN menjadi cerminan praktik komunikasi lintas budaya yang berorientasi pada stabilitas, bukan konfrontasi.

4. Karakteristik “ASEAN Way” dalam Diplomasi Regional

(Tekunan, 2014)

“Karakteristik ASEAN Way”. Bisa dijadikan landasan budaya komunikasi ASEAN berbasis konsensus, dialog, dan non-intervensi. Tekunan (2014) menjelaskan bahwa diplomasi ASEAN dibangun di atas nilai-nilai konsensus, non-intervensi, dan dialog. “ASEAN Way” berfungsi sebagai mekanisme komunikasi yang unik untuk membangun stabilitas dan perdamaian regional. “ASEAN Way memungkinkan negara-negara anggota terlibat dalam diplomasi multilateral tanpa meningkatkan konflik, memastikan partisipasi yang inklusif dan menghormati sensitivitas nasional.” (Caballero Anthony, 2022) Kerangka ini menegaskan bahwa praktik komunikasi diplomatik ASEAN bukan hanya formalitas, tetapi juga cerminan budaya politik dan etika komunikasi Asia Tenggara.

5. Diplomasi Digital dan Adaptasi

Komunikasi Modern (Triwibowo, 2023)

“Diplomasi Digital dan Adaptasi Komunikasi Modern” untuk mendukung bagian tentang diplomasi publik digital. Triwibowo (2023) menunjukkan bahwa diplomasi

digital menjadi sarana baru bagi negara dan organisasi regional untuk berkomunikasi lintas batas secara cepat dan efisien. Dalam konteks ASEAN, praktik diplomasi digital memperkuat keterlibatan publik, transparansi informasi, dan penyebaran nilai-nilai organisasi. Perspektif ini melengkapi teori Melissen (2005) tentang diplomasi publik dengan menambahkan dimensi digital dan jaringan global.

Metode penelitian

1. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis wacana diplomasi dan praktik komunikasi dalam forum multilateral ASEAN.

2. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif-kualitatif, karena bertujuan menggambarkan pola komunikasi, penggunaan bahasa diplomasi, dan dinamika konsensus tanpa melakukan pengukuran numerik.

3. Objek Kajian

Objek kajian meliputi:

3.1 Teks pernyataan resmi ASEAN (communiqué, joint statement, chairman statement).

3.2 Transkrip pidato pejabat ASEAN dalam pertemuan multilateral.

3.3 Dokumen diplomatik terkait mekanisme musyawarah dan konsensus.

3.4 Praktik bahasa diplomasi dalam interaksi antarnegara anggota.

4. Teknik Pengumpulan Data

4.1 Studi Dokumentasi

4.1.1 Dokumen resmi ASEAN.

4.1.2 Laporan pertemuan multilateral.

4.1.3 Rilis pers dari Kementerian Luar Negeri negara anggota.

4.1.4 Artikel akademik tentang diplomasi ASEAN.

4.2 Studi Pustaka

4.2.1 Literatur mengenai teori diplomasi, bahasa diplomasi, komunikasi internasional, dan analisis wacana.

4.2.2 Observasi Tidak Langsung (Online/Arsip)

4.2.3 Mengamati rekaman konferensi pers atau siaran forum ASEAN yang tersedia publik.

5. Analisis Data

5.1 Menggunakan Analisis Wacana Kritis (Fairclough), dengan langkah:

1. Deskripsi: mengidentifikasi struktur bahasa, pilihan kata, strategi diplomatik (ambiguity, politeness, mitigasi konflik).

2. Interpretasi: membaca konteks sosial-politik yang memengaruhi gaya komunikasi.

3. Eksplanasi: menjelaskan bagaimana bahasa diplomasi mencerminkan nilai ASEAN (konsensus, non-interference, hubungan harmonis).

Analisis dan Pembahasan

1. Diplomasi sebagai Proses Komunikasi Multilateral ASEAN

“Diplomasi pada dasarnya adalah usaha untuk meyakinkan pihak lain atau negara lain agar memahami dan membenarkan pandangan kita, dan jika mungkin, mendukung pandangan kita itu tanpa menggunakan kekerasan.”

Djalal, H. (1979)

“Diplomasi dalam hubungan dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.” Panikkar, K. M. (1956)

“Diplomasi adalah komunikasi formal yang dilakukan oleh suatu negara dengan pihak lain di luar negara.” Djalal, H. (2003) Pertemuan-pertemuan ASEAN tahun 2025 secara jelas menunjukkan penerapan diplomasi sebagai proses komunikasi yang berorientasi pada *mutual understanding* seperti yang dijelaskan oleh Berridge (2015). Diplomasi bukan sekadar kebijakan, tetapi merupakan proses komunikasi terorganisasi yang esensial antara aktor negara dan non-negara. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan dan koordinasi kebijakan tanpa konfrontasi langsung. Fokusnya bukan pada hasil yang dipaksakan, tetapi pada proses komunikasi yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, konsep **“ASEAN Way”** (Berridge, 2015): proses komunikasi antarnegara yang menekankan kesepakatan dan koordinasi tanpa konfrontasi, sejalan dengan prinsip ASEAN Way (konsensus,

non-intervensi, dan dialog). (Tekunan, 2014) memperkuat pemahaman bahwa komunikasi diplomatik ASEAN memiliki karakter khas—berbasis konsensus, non-intervensi, dan pencarian harmoni. Misalnya, dalam *6th Interface Meeting between AICHR and CSOs*, AICHR memfasilitasi komunikasi inklusif antara pemerintah dan masyarakat sipil tanpa konfrontasi langsung. Pendekatan ini bukan hanya bentuk komunikasi politik, tetapi refleksi dari nilai-nilai sosial budaya Asia Tenggara yang menekankan kesopanan dan saling menghormati.

“Pencapaian ASEAN dalam membangun institusi multilateral dan mempromosikan regionalisme inklusif (‘open regionalism’) menunjukkan bahwa “ASEAN Way” berperan dalam komunikasi diplomatik kawasan.” (Caballero-Anthony, 2022)

“ASEAN Way telah menjadi fondasi bagi diplomasi regional, menekankan konsensus, non-intervensi, dan penyelesaian isu melalui dialog inklusif.” (Caballero Anthony, 2022)

“Diplomasi multilateral ASEAN menekankan kolaborasi berkelanjutan antarnegara

anggota, bukan sekadar pencapaian hasil instan.” (Berridge, 2015)

“Forum AICHR-CSOs menunjukkan bagaimana ASEAN memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat sipil dengan pendekatan non-adversarial.” (ASEAN, 2025)

Beginu pula dalam *32nd ASEAN-EU Joint Cooperation Committee (JCC)*, struktur komunikasi yang digunakan mencerminkan prinsip *rules-based multilateralism* dan dialog setara. Dalam kerangka Tekunan (2014), praktik ini memperlihatkan bahwa “ASEAN Way” bukan sekadar norma prosedural, melainkan strategi komunikasi yang menjaga stabilitas hubungan antarnegara anggota dan mitra eksternal seperti Uni Eropa.

Diplomasi Pertahanan dan Komunikasi Multilateral

Menurut Berridge (2015), diplomasi merupakan proses komunikasi terorganisasi antara aktor negara dan non-negara untuk mencapai tujuan strategis tanpa konfrontasi langsung. Dalam konteks pertahanan, diplomasi tidak hanya melibatkan negosiasi militer, tetapi juga membangun

persepsi positif, koordinasi kebijakan, dan penyebaran informasi mengenai strategi pertahanan.

Diplomasi pertahanan multilateral di ASEAN sering dilakukan melalui forum seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) dan ASEAN Regional Forum (ARF). Forum-forum ini menuntut kemampuan komunikasi yang tinggi, termasuk penggunaan bahasa yang tepat untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik diplomatik.

2. Diplomasi Publik Digital sebagai Penguatan Soft Power

ASEAN secara aktif menggunakan platform digital untuk mengartikulasikan pesan dan nilai-nilainya. Hal ini sejalan dengan Triwibowo (2023) yang menegaskan bahwa diplomasi digital merupakan fase baru diplomasi publik yang menghubungkan aktor negara dan non-negara secara langsung di ruang digital. (Melissen,2005. Dan Hall&Smith,2013) “Komunikasi publik bukan hanya sarana penyebaran nilai, tetapi juga instrumen strategis untuk mempertahankan pengaruh di

tengah rivalitas kekuatan regional.”

ASEAN berperan sebagai aktor negara untuk melakukan diplomasi digital dengan memanfaatkan platform digital melalui situs resmi ASEAN dan akun media sosial ...” (Intentilia et al., 2022)

ASEAN memanfaatkan platform digital resmi, seperti situs ASEAN.org, media sosial (Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube), serta siaran pers daring untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat dan transparan. Narasi yang digunakan menekankan nilai-nilai kolaborasi, seperti “partnership,” “sustainability,” dan “dialogue,” yang bertujuan membangun kepercayaan publik global sekaligus menegaskan peran ASEAN sebagai aktor normatif yang mendorong dialog dan kerja sama lintas batas (Triwibowo, 2023). Strategi ini memungkinkan ASEAN menghadirkan diri sebagai penyebar nilai perdamaian, inklusivitas, dan stabilitas, bukan sekadar aktor politik atau ekonomi.

Publikasi daring ASEAN—melalui ASEAN.org, media sosial, dan siaran pers—menunjukkan bentuk diplomasi

publik digital yang memperkuat transparansi dan citra positif. Narasi seperti “partnership,” “sustainability,” dan “dialogue” digunakan untuk membangun kepercayaan publik global. Ini menegaskan bahwa ASEAN mengadopsi model diplomasi publik yang lebih terbuka dan partisipatif, sesuai dengan paradigma *networked diplomacy* yang dijelaskan oleh Triwibowo (2023) sebagai berikut

“ASEAN menggunakan paradigma ini untuk memperkuat citra sebagai aktor normatif yang mendorong dialog dan kerja sama lintas batas, bukan hanya dalam forum tradisional tetapi juga di media sosial dan platform online resmi.”

Selain itu, dalam kerangka **Hall & Smith (2013)**, praktik ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari kompetisi *soft power* di Asia. ASEAN berupaya menonjolkan dirinya bukan sebagai kekuatan militer atau ekonomi, melainkan sebagai *normative power*—penyebar nilai dialog, stabilitas, dan kerja sama. Dengan memanfaatkan diplomasi digital, ASEAN memperluas pengaruhnya dan memperkuat posisinya dalam persaingan citra regional

dengan aktor besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa.

Dengan demikian, diplomasi publik digital ASEAN adalah strategi komunikasi yang kompleks, berlapis, dan adaptif. Tidak hanya memperkuat nilai-nilai organisasi, tetapi juga menjadi instrumen soft power yang memungkinkan ASEAN mempertahankan relevansi, memediasi konflik regional, dan memimpin agenda kerja sama lintas batas dengan cara yang harmonis dan inklusif.

3. Analisis Bahasa Diplomasi dalam Dokumen Resmi ASEAN

Karakteristik bahasa diplomatik yang diidentifikasi oleh Hare & Harland (2019) juga sejalan dengan nilai komunikasi ASEAN sebagaimana dijelaskan oleh Tekunan (2014). Dalam setiap siaran pers resmi, bahasa yang digunakan menampilkan *constructive ambiguity*—ketidakjelasan yang disengaja untuk menjaga keseimbangan kepentingan.

Bahasa Diplomasi membutuhkan penyesuaian konstan terhadap keadaan yang berubah; harus memberi ruang untuk hal-hal yang tak terduga; yang tidak terduga adalah apa yang selalu terjadi dalam urusan

luar negeri. Nuansa, fleksibilitas, dan terkadang ambiguitas adalah alat diplomasi Henry Kissinger dalam artikel “Diplomacy and Ambiguity: Constructing Interests in Cooperation” oleh Wesley Widmaier et al. (2023) di *Asia Policy* 18(4)

Frasa seperti “*shared commitment*,” “*constructive engagement*,” dan “*explored potential collaborations*” berfungsi sebagai instrumen linguistik untuk menegaskan keterbukaan tanpa komitmen keras. Dalam konteks budaya diplomatik ASEAN, hal ini membantu mencegah “kehilangan muka” (loss of face) dan menjaga keharmonisan. Dengan demikian, bahasa diplomasi ASEAN menjadi cerminan praktik komunikasi lintas budaya yang sadar konteks dan berorientasi pada stabilitas, bukan konfrontasi.

Dari perspektif linguistik politik, Fairclough (2010) menegaskan bahwa bahasa adalah alat kekuasaan: cara pesan dibingkai dapat memajukan tujuan strategis sekaligus menghindari konfrontasi. Dalam praktik ASEAN, pemilihan kata, struktur kalimat, dan nuansa bahasa dipilih secara sengaja untuk

menjaga stabilitas hubungan antarnegara anggota dan hubungan dengan aktor eksternal. Misalnya, penggunaan istilah “*explored potential collaborations*” dalam laporan kerjasama ASEAN tidak menegaskan keberhasilan, tetapi menunjukkan niat terbuka untuk bekerja sama, sehingga menghindari klaim yang dapat menimbulkan perasaan tersisih bagi pihak lain.

Selain itu, dokumen resmi ASEAN menunjukkan fleksibilitas bahasa dalam menangani isu kompleks. Misalnya, dalam Joint Press Release of the 32nd ASEAN–EU Joint Cooperation Committee (JCC), istilah “*cooperation in a constructive manner*” digunakan untuk menunjukkan komitmen kerja sama, sekaligus memberi ruang bagi interpretasi masing-masing pihak tanpa memaksakan hasil tertentu. Ini adalah contoh strategi ambiguitas konstruktif, yang memungkinkan ASEAN mengelola dinamika multilateral dengan diplomasi yang hati-hati dan inklusif. Praktik serupa terlihat dalam dokumen AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), di mana

istilah “*engagement with civil society*” digunakan untuk menunjukkan partisipasi masyarakat sipil secara terbuka tanpa menimbulkan kesan intervensi terhadap kebijakan domestik negara anggota. Strategi bahasa ini menekankan inklusivitas, transparansi, dan kerja sama lintas sektor, sekaligus menjaga sensitivitas nasional yang tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Dari perspektif komunikasi lintas budaya, bahasa diplomasi ASEAN juga menekankan sopan santun dan penghormatan terhadap hierarki. Dalam negosiasi multilateral, pilihan kata yang netral dan fleksibel membantu menciptakan suasana dialog yang kondusif. Ini sejalan dengan prinsip “saving face” yang penting dalam budaya Asia Tenggara, di mana menjaga keharmonisan sosial lebih diutamakan daripada menang atau kalah dalam argumen diplomatik. Selain itu, bahasa diplomasi digital ASEAN—melalui media sosial, situs resmi, dan publikasi daring—mengadaptasi prinsip yang sama: netral, inklusif, dan strategis. Misalnya, dalam kampanye digital terkait kerja sama vaksin COVID-19, ASEAN menggunakan istilah

“collaborative effort” dan *“joint commitment”* untuk menekankan solidaritas regional tanpa menimbulkan kontroversi terkait alokasi sumber daya atau prioritas negara anggota tertentu.

Secara keseluruhan, analisis bahasa diplomasi dalam dokumen resmi ASEAN menunjukkan bahwa strategi komunikasi berbasis konstruktif ambiguitas, sopan santun, dan netralitas merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik, membangun kepercayaan, dan memperkuat posisi ASEAN sebagai aktor normatif di kancah internasional. Bahasa diplomasi ASEAN bukan sekadar alat komunikasi, tetapi instrumen strategis yang mencerminkan core identity organisasi, integrasi budaya, dan etika politik kawasan.

4. Fungsi dan Dampak Komunikasi Diplomatik ASEAN

Praktik komunikasi diplomatik ASEAN pada tahun 2025 memiliki empat fungsi utama:

- 1. Membangun konsensus dan stabilitas regional**, sejalan dengan prinsip *“ASEAN Way”* (Tekunan, 2014). memastikan bahwa setiap keputusan atau

kebijakan regional diambil berdasarkan kesepakatan bersama antarnegara anggota. Prinsip *“ASEAN Way”* menekankan konsensus, non-intervensi, dan dialog sebagai landasan komunikasi diplomatik.

“ASEAN bangga menjadi contoh prinsip konsensus dan saling percaya dalam pengambilan keputusannya sendiri... Perluasan ... semakin memperkuat fondasi arsitektur regional ... sehingga tercipta kepercayaan dalam kerja sama keamanan multilateral di kawasan.”

Bibliografi(APA):ASEAN. (2015, 4 Januari).

Dengan melakukan diplomasi multilateral, negara-negara menciptakan kesepakatan bersama sehingga memperkuat kerangka kerja keamanan kolektif, mengurangi risiko konflik antarnegara, dan menjaga kestabilan kawasan.

Dengan pendekatan ini, ASEAN mengurangi risiko konflik antaranggota karena keputusan tidak dipaksakan, melainkan melalui proses negosiasi yang inklusif.

Stabilitas politik dan hubungan antarnegara anggota tetap terjaga, yang penting untuk

menghadapi isu-isu sensitif seperti Laut Tiongkok Selatan atau dinamika geopolitik Asia Tenggara.

2. Memfasilitasi dialog lintas sektor dan lintas aktor, termasuk masyarakat sipil dan mitra internasional. Komunikasi tidak hanya antarnegara, tetapi juga mencakup masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan mitra internasional. Misalnya, pertemuan AICHR dengan CSOs atau pertemuan dengan mitra eksternal seperti Korea Selatan.

ASEAN memposisikan dirinya sebagai platform inklusif untuk menyuarakan kepentingan berbagai pihak, sehingga keputusan regional lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

“Dialog di sini memegang peran utama dalam mengatasi keterputusan yang baru terbentuk, dan mendekatkan kita satu sama lain, menuju kebaikan bersama.” — KAICIID (2020)

Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi, sekaligus membangun legitimasi sosial dan politik di mata masyarakat regional.

3. Memperluas soft power regional, sebagaimana dijelaskan oleh Hall & Smith (2013), melalui citra ASEAN sebagai kekuatan damai dan inklusif. Penggunaan komunikasi diplomatik untuk memperkuat citra ASEAN sebagai aktor damai dan inklusif di kancah internasional. Melalui diplomasi publik dan publikasi digital, ASEAN menekankan nilai kerja sama, stabilitas, dan humanisme.

ASEAN bukan hanya memanfaatkan kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga normative power, yaitu pengaruh melalui penyebaran nilai dan norma yang diterima secara luas.

Normative power menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional.” — dari artikel “Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen”

Soft power ini memungkinkan ASEAN berperan lebih strategis di forum internasional, memediasi konflik regional, dan

membangun reputasi positif tanpa konfrontasi.

4. **Mengadopsi inovasi diplomasi digital**, sebagaimana dijelaskan oleh Triwibowo (2023), untuk menjangkau publik global dan memperkuat legitimasi organisasi. Pemanfaatan platform digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan komunikasi dan membangun legitimasi organisasi. Triwibowo (2023) menekankan bahwa diplomasi digital memungkinkan ASEAN untuk menghubungkan aktor negara dan non-negara secara langsung, menyebarkan informasi secara cepat, dan memonitor persepsi publik.

Diplomasi digital menjadi alat strategis yang melengkapi diplomasi tradisional, menciptakan komunikasi hibrida antara ruang rapat formal dan ruang publik daring. “Diplomasi digital harus menjadi ruang kolaborasi antara negara dan masyarakat. ... Melalui platform ini, berbagai ide, isu, dan kampanye digital dapat diintegrasikan agar selaras dengan kepentingan diplomasi nasional.” — Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta,
Dr. Ratih Heringtyas.

ASEAN dapat lebih responsif terhadap isu global, memperkuat narasi positif, dan menjangkau audiens yang lebih luas, sekaligus meningkatkan efektivitas soft power di tingkat internasional.

Kombinasi empat fungsi ini memperlihatkan bahwa komunikasi diplomatik bukan hanya alat teknis, tetapi merupakan *core identity* ASEAN. Dengan memadukan strategi tradisional dan digital, ASEAN memperlihatkan kapasitas adaptifnya dalam menjaga relevansi dan pengaruh di tengah dinamika geopolitik global.

Implementasi Teori dalam hubungan antar negara (Indonesia-Asean)

Hubungan Indonesia-ASEAN adalah hubungan yang dinamis, kolaboratif, dan berbasis konsensus, yang menggabungkan komunikasi diplomatik tradisional dan digital, serta memanfaatkan soft power melalui nilai, budaya, dan bahasa diplomasi. “Indonesia akan terus mendorong implementasi ... sebagai bagian dari kebijakan utama ... tentunya

membutuhkan peran aktif ... sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN.” — Pernyataan dari anggota DPR RI-BKSAP mengenai konsensus dalam ASEAN.

Indonesia memposisikan diri sebagai aktor normative power yang menjaga stabilitas regional, memfasilitasi dialog lintas sektor, dan memperkuat pengaruh ASEAN di kancah global.

Diplomasi sebagai Proses Komunikasi Antarnegara (Berridge, 2015)

Indonesia mempraktikkan diplomasi sebagai suatu proses komunikasi yang terorganisir dan sistematis, di mana setiap langkah dirancang untuk menekankan koordinasi yang erat serta pencapaian kesepakatan berbasis konsensus. Pendekatan ini mencerminkan filosofi diplomasi ASEAN yang mengedepankan musyawarah, kepercayaan, dan kerja sama, bukan konfrontasi. Dalam praktiknya, Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam berbagai forum dan mekanisme ASEAN, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) yang berfokus pada keamanan regional, serta ASEAN Defence Ministers'

Meeting (ADMM) yang menekankan kerja sama pertahanan dan pengelolaan krisis secara kolektif.

Melalui forum-forum tersebut, Indonesia mendorong dialog terbuka, negosiasi yang berkelanjutan, dan pembangunan konsensus di antara negara-negara anggota. Aktivitas ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu aktor sentral di kawasan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian regional. Diplomasi Indonesia di ASEAN menjadi cerminan dari prinsip non-intervensi, kesetaraan, dan kerjasama sukarela, yang merupakan ciri khas identitas ASEAN. Selain itu, Indonesia memanfaatkan diplomasi ini untuk membangun hubungan lintas sektor—antara pemerintah, militer, akademisi, dan masyarakat sipil—sehingga menciptakan jaringan komunikasi yang lebih luas dan efektif dalam menghadapi isu-isu strategis kawasan, termasuk keamanan, ekonomi, dan bencana.

Dengan demikian, diplomasi Indonesia bukan sekadar instrumen teknis untuk mencapai tujuan politik, melainkan juga bagian dari

identitas regional ASEAN, yang menekankan nilai-nilai kolektif, kolaboratif, dan berbasis konsensus sebagai fondasi utama dalam membangun stabilitas dan kerja sama di Asia Tenggara.

Pelaksanaan Karakteristik “ASEAN Way” (Tekunan, 2014)

Dalam hubungan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia secara konsisten menerapkan nilai-nilai **“ASEAN Way”**, yang menekankan prinsip dialog, non-intervensi, dan pencapaian kesepakatan berbasis konsensus. Pendekatan ini tidak hanya menjadi strategi diplomatik semata, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga harmoni dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berupaya menghindari konfrontasi langsung dalam menyelesaikan perbedaan atau konflik, serta lebih mendorong tercapainya kesepakatan bersama yang mengakomodasi kepentingan semua negara anggota.

Peran Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengaruh signifikan di ASEAN memperkuat implementasi nilai-nilai ini. Misalnya, ketika

menjabat sebagai ketua ASEAN pada beberapa periode, Indonesia memainkan peran sentral dalam merancang agenda pertemuan, memfasilitasi dialog antaranggota, dan memastikan bahwa setiap keputusan diambil melalui musyawarah dan persetujuan bersama. Praktik komunikasi diplomatik yang inklusif ini memungkinkan perbedaan pandangan antaranggota dihormati dan diselesaikan secara konstruktif, sehingga memperkuat solidaritas regional.

Lebih jauh lagi, penerapan **“ASEAN Way”** oleh Indonesia juga mencakup kemampuan diplomatik untuk membina hubungan lintas sektor—melibatkan pemerintah, lembaga internasional, akademisi, dan masyarakat sipil—dalam membangun konsensus dan mempromosikan kepentingan bersama ASEAN. Dengan demikian, komunikasi diplomatik Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis dalam menyampaikan kebijakan, tetapi juga sebagai identitas regional yang menekankan nilai-nilai kolektif, kolaboratif, dan berbasis konsensus, yang menjadi

fondasi utama bagi perdamaian, keamanan, dan kerja sama berkelanjutan di kawasan.

Diplomasi Publik dan Soft Power (Melissen, 2005; Hall & Smith, 2013)

Indonesia juga secara aktif mengadopsi diplomasi publik, yang memanfaatkan budaya, kapasitas digital, dan media komunikasi modern untuk memperkuat soft power dalam hubungan dengan negara-negara ASEAN. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia tidak hanya berperan dalam forum formal diplomatik, tetapi juga membangun pengaruh melalui persepsi positif di mata publik, media, dan komunitas internasional.

Dalam praktiknya, diplomasi publik Indonesia mencakup berbagai kampanye budaya, seperti promosi seni, tradisi, dan bahasa lokal, yang mencerminkan kekayaan budaya bangsa sekaligus menjadi alat membangun jembatan komunikasi antarnegara. Selain itu, Indonesia memanfaatkan platform digital—termasuk media sosial, situs resmi, dan konferensi daring—untuk menyampaikan narasi dan kebijakan secara transparan,

menarik simpati publik, serta memfasilitasi dialog lintas batas negara.

Strategi diplomasi publik ini juga berfungsi untuk mendukung agenda bersama ASEAN, seperti penyelesaian isu-isu sensitif di kawasan, contohnya konflik dan proses rekonsiliasi di Timor Leste, serta penguatan mekanisme keamanan regional. Dengan memadukan soft power dan diplomasi publik, Indonesia mampu memperkuat citra positifnya sebagai negara yang berperan konstruktif, kolaboratif, dan menghormati prinsip-prinsip “ASEAN Way”. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi Indonesia di mata negara anggota ASEAN lainnya, tetapi juga memperluas pengaruhnya dalam membentuk kebijakan regional, menjaga stabilitas, serta mempromosikan kerja sama multilateral yang berkelanjutan.

Bahasa Diplomasi dan Konstruktif Ambiguitas (Hare & Harland, 2019)

Dalam proses negosiasi di forum-forum ASEAN, Indonesia secara strategis menggunakan bahasa diplomatik yang bersifat netral, sopan, dan terukur. Pendekatan ini didukung oleh

prinsip konstruktif ambiguitas, yaitu penggunaan pernyataan yang sengaja dirancang fleksibel sehingga memungkinkan interpretasi berbeda, namun tetap menjaga kesepakatan bersama. Strategi ini sangat penting dalam konteks ASEAN, di mana setiap negara anggota memiliki kepentingan, perspektif, dan sensitivitas politik yang beragam.

Penggunaan bahasa yang sopan dan ambigu secara konstruktif membantu Indonesia dalam meminimalkan risiko konflik terbuka antarnegara, serta menjaga hubungan tetap harmonis di tingkat bilateral maupun multilateral. Dengan cara ini, Indonesia mampu mempertahankan "wajah" (face) negara-negara anggota, sehingga tidak ada pihak yang merasa dipermalukan atau tersisihkan dalam proses negosiasi.

Selain itu, konstruktif ambiguitas memungkinkan adanya ruang fleksibilitas dalam implementasi kebijakan dan kesepakatan, yang sangat penting mengingat ASEAN menganut prinsip konsensus dalam pengambilan keputusan. Strategi ini juga meningkatkan efektivitas komunikasi diplomatik Indonesia, karena

pesan yang disampaikan dapat diterima secara positif oleh semua pihak tanpa menimbulkan kesalahpahaman atau ketegangan.

Dengan demikian, penggunaan bahasa diplomasi yang netral dan konstruktif ambiguitas bukan sekadar teknik retoris, tetapi merupakan bagian dari identitas diplomasi ASEAN yang menekankan harmoni, inklusivitas, dan penyelesaian masalah melalui musyawarah. Praktik ini memperkuat reputasi Indonesia sebagai mediator yang bijaksana, kredibel, dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas regional di Asia Tenggara.

Diplomasi Digital dan Adaptasi Modern (Triwibowo, 2023)

Indonesia memanfaatkan diplomasi digital sebagai perpanjangan diplomasi publik dengan aktif di media sosial ASEAN dan forum digital, memperkuat keterlibatan publik serta transparansi informasi. Hal ini merupakan bagian dari strategi untuk memperluas jangkauan komunikasi dan memperkuat legitimasi serta soft power Indonesia dan ASEAN.

Contoh Praktis:

- Indonesia menggunakan forum seperti ARF dan ADMM untuk

mendorong dialog keamanan dan penyelesaian konflik secara damai menggunakan prinsip konsensus dan non-intervensi.

- Indonesia memimpin inisiatif penguatan ekonomi digital dan mendorong Code of Conduct di Laut Tiongkok Selatan, menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar sambil menjaga kepentingan kawasan.
- Melalui diplomasi budaya dan publik, Indonesia memengaruhi opini regional dengan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan kerjasama sebagai soft power yang konstruktif.

Dengan demikian, implementasi teori diplomasi di atas memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor utama dalam komunikasi diplomatik ASEAN yang mengedepankan prinsip kolaborasi, inklusivitas, dan adaptasi teknologi modern untuk menjaga stabilitas dan kerja sama regional.

Kesimpulan

Komunikasi diplomatik yang diperlakukan ASEAN pada tahun 2025 menampilkan perpaduan yang efektif antara diplomasi klasik yang berbasis dialog tertutup dan diplomasi

publik modern yang memanfaatkan media digital. Melalui forum multilateral seperti pertemuan AICHR dan JCC ASEAN-Uni Eropa, ASEAN berhasil menciptakan dan memelihara ruang dialog yang inklusif, terstruktur, dan konstruktif.

Penggunaan bahasa diplomatik yang khas—netral, sopan, dan fleksibel—secara strategis mendukung terciptanya hubungan antarnegara yang harmonis dan mencegah eskalasi konflik. Secara simultan, pemanfaatan diplomasi publik digital memperluas jangkauan narasi positif ini ke audiens global. Secara keseluruhan, praktik komunikasi ini secara signifikan memperkuat *soft power* ASEAN, mengukuhkan citranya sebagai organisasi regional yang kohesif, relevan, dan berkomitmen pada kerja sama, stabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia di kawasan.

Daftar Pustaka

- Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy: Theory and Practice*. Palgrave Macmillan.
- Hare, P., & Harland, J. (2019). *The Language of Diplomacy*. Palgrave Macmillan.
- Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy: Soft Power in*

- International Relations.* Palgrave Macmillan. Hall, I., & Smith, F. (2013). *The Struggle for Soft Power in Asia: Public Diplomacy and Regional Competition.* Australian National University.
- Tekunan, S. (2014). *The ASEAN Way: The Way to Regional Peace? Journal of International Relations,* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Triwibowo, D. (2023). *The Characteristics of Indonesian Digital Diplomacy. Journal of ASEAN Studies,* Binus University.
- ASEAN (2025). *Joint Press Release of the 6th Interface Meeting between AICHR and CSOs.* Retrieved from <https://asean.org>
- ASEAN (2025). *Joint Press Release of the 32nd ASEAN–EU Joint Cooperation Committee Meeting.* Retrieved from <https://asean.org>
- ASEAN (2025). *Joint Press Release of the 1st Interface Meeting AICHR–ROK.* Retrieved from <https://asean.org>
- ASEAN (2025). *Joint Press Release of the 2nd Interface Meeting AICHR–Child Rights Coalition Asia.* Retrieved from <https://asean.org>
- ASEAN (2025). *Joint Press Release of the 8th Interface Meeting AICHR–WGAHRM.* Retrieved from <https://asean.org>
- Caballero-Anthony, M. (2022). *The ASEAN Way and the changing security environment.* Intentilia, A. A. M., Haes, P. E., & Suardana, G. (2022). *Utilizing Digital Platforms for Diplomacy in ASEAN: A Preliminary Overview.*
- Henry Kissinger dalam artikel “Diplomacy and Ambiguity: Constructing Interests in Cooperation” oleh Wesley Widmaier et al. (2023) di *Asia Policy* 18(4)
- Djalal, H. (1979). *Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. [Google Books+1](#)
- Panikkar, K. M. (1956). *The Principles and Practice of Diplomacy* (Three Lectures). Delhi: Ranjit Printers & Publishers by arrangement with the Delhi School of Economics. [econbiz.de+1](#)
- Djalal, H. (2003). *Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Lessons Learned.* Jakarta: The Habibie Center. ISBN 979-96962-3-2. [library.uii.ac.id+1](#)
- ASEAN. (2015, 4 Januari). *Membangun kepercayaan strategis untuk perdamaian, kerja sama, dan kemakmuran di*

kawasan Asia-Pasifik. Modern Diplomacy. Diakses dari <https://moderndiplomacy.eu/2015/01/04/building-strategic-trust-for-peace-cooperation-and-prosperity-in-the-asia-pacific-region/>

ASEAN sebagai platform multilateral — penelitian menyebutkan bahwa ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara melalui dialog antar-anggota dan mekanisme keamanan kolektif.

ejurnal.mejailmiah.com

Diplomasi pertahanan negara menguatkan stabilitas regional melalui forum multilateral dan pembangunan kepercayaan antarnegara.

ejurnal.cahayailmubangsa.institute+1

KAICIID. (2020). *75 Tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa: Bagaimana Dialog Memperkuat Diplomasi Multilateral.* Tersedia di:

<https://www.kaiciid.org/stories/news/75-years-united-nations-how-dialogue-strengthens-multilateral-diplomacy>

Margiansyah, Defbry. “Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen.”

Jurnal Penelitian Politik, Vol.15 No.1.

LLDIKTI Wilayah V. (2025, 29 Oktober). “Pakar UMY: Diplomasi Digital Perlu Ekosistem Kolaboratif antara Negara dan Publik”.

DPR RI-BKSAP. “Konsensus Jadi Kunci Stabilitas ASEAN di Tengah Ketegangan Global”. E-Media DPR RI.

<https://id.scribd.com/document/401258085/KOMUNIKASI-DIPLOMATIK>